

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia bermula sejak akhir abad ke-19, melalui pembangunan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri di beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan perkebunan teh. Hingga kemudian antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang.

Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, di akhir tahun 1945, para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersamasama dengan Pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno kemudian membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu adalah sebesar 157,5 MW. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan, diikuti pembentukan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik

Negara, bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tahun 1994 Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. PLN kemudian beralih menjadi Perusahaan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. PLN kini telah berkembang sebagai salah satu dari kelompok korporasi dengan aset terbesar di seluruh dunia. Total daya pembangkit milik PLN yang dikelola sampai akhir tahun 2017 telah semakin berkembang menjadi 39.651,80 (2016: 39.785,06 MW).

1. Visi, Misi, Motto dan Nilai Perusahaan

a. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

b. Misi

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

c. Motto

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih baik (*Electricity for better Life*).

d. Nilai Perusahaan

Nilai-nilai dasar PLN adalah Saling Percaya, Integritas, Peduli, dan Pembelajar (SIPP). Nilai-nilai dasar PLN adalah Saling Percaya, Integritas, Peduli, dan Pembelajar (SIPP).

1) Saling Percaya

Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.

2) Integritas

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

3) Peduli

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

4) Pembelajar

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

2. Kegiatan Bidang Usaha Perusahaan

a. Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha PLN, adalah:

- 1) Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
 - a) Pembangkitan tenaga listrik.
 - b) Penyaluran tenaga listrik.
 - c) Distribusi tenaga listrik.
 - d) Perencanaan dan pembangunan sarana tenaga listrik.
 - e) Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
 - f) Penjualan tenaga listrik.
- 2) Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:
 - a) Konsultasi ketenagalistrikan.
 - b) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
 - c) Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
 - d) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
 - e) Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
 - f) Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.

- g) Sertifikasi kompetensi tenaga teknik, ketenagalistrikan.
- 3) Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:
 - a) Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik.
 - b) Jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik.
 - c) Industri perangkat keras, lunak dibidang ketenagalistrikan.
 - d) Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
 - e) Usaha jasa ketenagalistrikan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT PLN (Persero) mengalami perubahan pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN tahun 2019 memutuskan mengangkat Djoko Raharjo Abumanan yang sebelumnya menjabat Direktur Bisnis regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN dan Direktur Pengadaan Strategis Dua, sejak 29 Mei 2019. Menggantikan Sofyan Basir, yang mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PLN dan disetujui oleh RUPS.

Sementara itu untuk posisi Direktur Bisnis Regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara digantikan oleh Supangkat Iwan Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis Dua. RUPS juga mengangkat dan menetapkan Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis Satu. Surat keputusan diberikan oleh Deputy Bidang

Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN
Edwin Hidayat Abdullah. Acara serah terima dan pengangkatan Direksi
Gedung Kementerian BUMN, digelar di Gedung Kementerian BUMN,
Jakarta Pusat.

Dengan perubahan di atas maka susunan Direksi PLN sebagai
berikut:

- a. Djoko Raharjo Abunaman sebagai Plt Direktur Utama PLN
- b. Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1
- c. Djoko Raharjo Abunaman sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2
- d. Sarwono sudarto sebagai Direktur Keuangan
- e. Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management
- f. Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Perencanaan Korporat
- g. Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Tengah
- h. Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa
Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara
- i. Haryanto W.S. sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat
- j. Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan
- k. Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Sulawesi
- l. Ahmad Rofik sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua
- m. Wiluyo Kusdiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera.

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Perhitungan Arus Kas

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan data-data yang
telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dihitung

arus kas masuk dan keluar kas sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Arus Kas
PT. PLN (Persero) Pusat
Tahun 2013-2017**

Ket	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	38.175,23	39.252,44	35.173,11	29.588,06	58.843,65
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(34.987,30)	(30.399,07)	(38.297,31)	(54.799,96)	(87.108,23)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(330,98)	(7.254,12)	(753,60)	43.595,05	30.609,70
Kenaikan/ (Penurunan) bersih kas dan setara kas	2.856,95	1.599,24	(3.877,78)	18.383,15	345,11
Kas dan setara kas awal tahun	39,85	25.529,96	27.111,53	23.596,34	37,63
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	-	(17,68)	362,53	(70,26)	41.909,22
Kas dan setara kas akhir tahun	25.529,97	27.111,52	23.596,34	41.909,22	42.291,96

(sumber: Laporan Arus Kas. www.pln.co.id)

Berdasarkan perhitungan arus kas, dimana kas dan setara kas tahun 2013 sebesar Rp 25.529,97 juta mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp 27.111,52 juta. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 23.596,34 juta dibandingkan tahun 2014, dan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 41.909,22 dan Rp 42.291,96. Dengan demikian maka dilakukan perhitungan rasio arus kas sebagai berikut:

a. Rasio Arus Kas Operasi

Rumus dari rasio arus kas operasi ini digunakan untuk menghitung kecukupan arus kas operasi dalam membayar kewajiban jangka pendek.

Data yang diperlukan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Data Perhitungan Rasio Arus Kas PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Arus Kas Operasi	Kewajiban Lancar
2013	38.175.230	89.309.959
2014	39.252.442	87.558.277
2015	37.289.083	120.138.893
2016	29.588.060	121.623.355
2017	56.843.655	139.074.658

Sumber: Laporan Posisi Keuangan dan Arus Kas Konsolidasi

Rasio Arus kas operasi di peroleh dari perbandingan antara arus kas operasi dengan kewajiban lancar perusahaan. Dengan demikian, rumus rasio arus kas adalah sebagai berikut:

$$AKO = \frac{Jumlah\ Arus\ Kas\ Operasi}{Kewajiban\ Lancar} \times 100\%$$

Berikut ini perhitungan dari rasio arus kas operasi PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AKO_{2013} &= \frac{Rp\ 38.175.230}{Rp\ 89.309.959} \\ &= 0,4274 = 42,74\% \end{aligned}$$

Maka, Rasio Arus Kas Operasi untuk tahun 2013 adalah sebesar 0,4274 atau 42,74% yang berarti untuk setiap Rp 1 kewajiban lancar dijamin dengan Rp 42,74 arus kas operasi. Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai rasio yang dipersyaratkan dalam menjaga likuiditas perusahaan dimana nilai rasio $0,4274 < 1$, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan pun tidak cukup memiliki kemampuan yang lebih dalam menyelesaikan kewajiban lancar hanya dengan menggunakan arus kas operasi di tahun tersebut tanpa dukungan aktivitas lain.

$$AKO_{2014} = \frac{Rp\ 39.252.442}{Rp\ 87.558.277}$$

$$= 0,4483 = 44,83\%$$

Maka, Rasio Arus Kas Operasi untuk tahun 2014 adalah sebesar 0,4483 atau 44,83% yang berarti untuk setiap 100 rupiah kewajiban lancar dijamin dengan 44,83 rupiah arus kas operasi. Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai rasio yang dipersyaratkan dalam menjaga likuiditas perusahaan dimana nilai rasio $0,4483 < 1$, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan pun tidak cukup memiliki kemampuan yang lebih dalam menyelesaikan kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasinya di tahun tersebut tanpa dukungan aktivitas lain dari pemanfaatan arus kas perusahaan.

$$AKO_{2015} = \frac{Rp\ 37.289.083}{Rp\ 120.138.893}$$

$$= 0,3104 = 31,04\%$$

Maka, Rasio Arus Kas Operasi untuk tahun 2015 adalah sebesar 0,3104 atau 31,04% yang berarti untuk setiap 100 rupiah kewajiban lancar dijamin dengan 31,04 rupiah arus kas operasi. Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai rasio yang dipersyaratkan dalam menjaga likuiditas perusahaan dimana nilai rasio $0,3104 < 1$, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan pun tidak cukup memiliki kemampuan yang lebih dalam menyelesaikan kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasinya di tahun tersebut tanpa dukungan aktivitas lain dari pemanfaatan arus kas perusahaan.

$$AKO_{2016} = \frac{Rp\ 29.588.060}{Rp\ 121.623.355}$$

$$= 0,2433 = 24,33\%$$

Maka, Rasio Arus Kas Operasi untuk tahun 2016 adalah sebesar 0,2433 atau 24,33% yang berarti untuk setiap 100 rupiah kewajiban lancar dijamin dengan 24,33 rupiah arus kas operasi. Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai rasio yang dipersyaratkan dalam menjaga likuiditas perusahaan dimana nilai rasio $0,2433 < 1$, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan pun tidak cukup memiliki kemampuan yang lebih dalam menyelesaikan kewajibannya hanya dengan menggunakan arus kas operasinya di tahun tersebut tanpa dukungan aktivitas lain dari pemanfaatan arus kas perusahaan.

$$AKO_{2017} = \frac{Rp\ 56.843.655}{Rp\ 139.074.658}$$

$$= 0,4087 = 40,87\%$$

Maka, Rasio Arus Kas Operasi untuk tahun 2017 adalah sebesar 0,4087 atau 40,87% yang berarti untuk setiap 100 rupiah kewajiban lancar dijamin dengan 40,87 rupiah arus kas operasi.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio arus kas operasi PT PLN (Persero), maka rekapitulasi dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

**Rekapitulasi Rasio Arus Kas PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Arus Kas Operasi	Kewajiban Lancar	Rasio AKO
2013	38.175.230	89.309.959	0,4274
2014	39.252.442	87.558.277	0,4483
2015	37.289.083	120.138.893	0,3104
2016	29.588.060	121.623.355	0,2433
2017	56.843.655	139.074.658	0,4087

Sumber: Data Diolah

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.3 terlihat bahwa arus kas operasi PT PLN (Persero) mengalami Fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan. Dalam hal ini berarti kemampuan arus kas operasi perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya cukup rendah. Setiap tahunnya rasio arus kas operasi PT PLN (Persero) berada dibawah angka 1, ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang cukup rendah untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2013 hingga 2017, nominal kewajiban perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah dari arus kas operasi dan juga terjadi karena adanya perubahan pada tingkat suku bunga pasar yang terkait dengan utang bank jangka panjang. Maka dari itu perusahaan harus lebih memaksimalkan arus kas masuk dari kegiatan operasi serta dapat memilih bank yang memiliki tingkat suku bunga pinjaman yang terendah.

b. Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan PT PLN (Persero) dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Maka, data yang diperlukan untuk menghitung rasio ini adalah:

Tabel 4.4

**Data Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga
PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Arus Kas Operasi	Bunga	Pajak
2013	38.175.230	28.366.978	3.221.807
2014	39.252.442	35.381.682	1.704.744
2015	37.289.083	37.708.595	3.789.944
2016	29.588.060	18.285.840	1.927.652
2017	56.843.655	17.894.129	6.218.927

Sumber: Laporan Arus Kas Konsolidasi PT PLN (Persero)

Rasio ini diperoleh dengan arus kas dari operasi ditambah pembayaran bunga, dan pembayaran pajak kemudian dibagi dengan pembayaran bunga. Maka rumus untuk menghitung rasio cakupan kas terhadap bunga adalah sebagai berikut:

$$CKB = \frac{Arus\ Kas\ Operasi + Bunga + Pajak}{Bunga}$$

Sehingga, perhitungan rasio cakupan kas terhadap bunga PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} CKB_{2013} &= \frac{38.175.230 + 28.366.978 + 3.221.807}{28.366.978} \\ &= 2,459 \end{aligned}$$

Maka, Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga untuk tahun 2013 adalah sebesar 2,459 yang berarti bahwa jumlah arus kas yang dapat menutupi beban bunga yang harus di bayar sebanyak 2 kali.

$$\begin{aligned} CKB_{2014} &= \frac{39.252.442 + 35.381.682 + 1.704.744}{35.381.682} \\ &= 2,157 \end{aligned}$$

Maka, Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga untuk tahun 2014 adalah sebesar 2,157 yang berarti bahwa jumlah arus kas yang dapat menutupi beban bunga yang harus di bayar sebanyak 2 kali.

$$\begin{aligned} CKB_{2015} &= \frac{29.588.060 + 37.708.595 + 3.789.944}{37.708.595} \\ &= 2,089 \end{aligned}$$

Maka, Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga untuk tahun 2015 adalah sebesar 2,089 yang berarti bahwa jumlah arus kas yang dapat menutupi beban bunga yang harus di bayar sebanyak 2 kali.

$$CKB_{2016} = \frac{37.289.083 + 18.285.840 + 1.927.652}{18.285.840}$$

$$= 3,144$$

Maka, Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga untuk tahun 2016 adalah sebesar 3,144 yang berarti bahwa jumlah arus kas yang dapat menutupi beban bunga yang harus di bayar sebanyak 3 kali.

$$CKB_{2017} = \frac{56.843.655 + 17.894.129 + 6.218.927}{17.894.129}$$

$$= 4,524$$

Maka, Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga untuk tahun 2017 adalah sebesar 4,524 yang berarti bahwa jumlah arus kas yang dapat menutupi beban bunga yang harus di bayar sebanyak 4 kali.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio cakupan kas terhadap bunga PT PLN (Persero), maka rekapitulasi dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

**Rekapitulasi Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga
PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Arus Kas Operasi	Bunga	Pajak	Rasio CKB
2013	38.175.230	28.366.978	3.221.807	2,459
2014	39.252.442	35.381.682	1.704.744	2,157
2015	37.289.083	37.708.595	3.789.944	2,089
2016	29.588.060	18.285.840	1.927.652	3,144
2017	56.843.655	17.894.129	6.218.927	4,524

Sumber: Data Diolah

Dapat dilihat pada Tabel 4.5 bahwa hasil rasio cakupan kas terhadap Bunga PT PLN (Persero) mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam

menutupi biaya bunga pada tahun 2013 sampai 2017 sangat tinggi. Karena hasil rasio tersebut lebih dari 1. Hal ini terjadi dikarenakan semakin tinggi rasio cakupan kas terhadap bunga yang diperoleh maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga.

c. Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL)

Rasio ini digunakan mengukur kemampuan PT PLN (Persero) dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Maka, data yang diperlukan untuk menghitung rasio ini adalah:

Tabel 4.6

**Data Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar
PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Arus Kas Operasi	Dividen Kas	Hutang Lancar
2013	38.175.230	1.443.800	89.309.959
2014	39.252.442	0	87.558.277
2015	37.289.083	3.962.441	120.138.893
2016	29.588.060	2.137.752	121.623.355
2017	56.843.655	2.150.837	139.074.658

Sumber: Laporan Arus Kas Konsolidasi PT PLN (Persero)

Rasio ini diperoleh dengan arus kas dari operasi ditambah deviden kas dan dibandingkan dengan hutang lancar. Maka rumus untuk menghitung rasio cakupan kas terhadap hutang lancar adalah sebagai berikut:

$$CKHL = \frac{\text{Arus Kas Operasi} + \text{Dividen Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Sehingga, perhitungan rasio cakupan kas terhadap hutang lancar pada PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

$$CKHL_{2013} = \frac{38.175.230 + 1.443.800}{89.309.959}$$

$$= 0,444$$

Maka, Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar untuk tahun 2013 adalah sebesar 0,444 yang berarti kemampuan arus kas operasi untuk membayar hutang lancar sebesar 0,444 kali.

$$CKHL_{2014} = \frac{39.252.442 + 0}{87.558.277}$$

$$= 0,448$$

Maka, Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar untuk tahun 2014 adalah sebesar 0,448 yang berarti kemampuan arus kas operasi untuk membayar hutang lancar sebesar 0,448 kali.

$$CKHL_{2015} = \frac{37.289.083 + 3.962.441}{120.138.893}$$

$$= 0,343$$

Maka, Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar untuk tahun 2015 adalah sebesar 0,343 yang berarti kemampuan arus kas operasi untuk membayar hutang lancar sebesar 0,343 kali.

$$CKHL_{2016} = \frac{29.588.060 + 2.137.752}{121.623.355}$$

$$= 0,261$$

Maka, Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar untuk tahun 2016 adalah sebesar 0,261 yang berarti kemampuan arus kas operasi untuk membayar hutang lancar sebesar 0,261 kali.

$$CKHL_{2017} = \frac{56.843.655 + 2.150.837}{139.074.658}$$

$$= 0,424$$

Maka, Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar untuk tahun 2017 adalah sebesar 0,424 yang berarti kemampuan arus kas operasi untuk membayar

hutang lancar sebesar 0,424 kali.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio cakupan kas terhadap hutang lancar PT PLN (Persero) maka rekapitulasi dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

**Rekapitulasi Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar
PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Arus Kas Operasi	Dividen Kas	Hutang Lancar	Rasio CKHL
2013	38.175.230	1.443.800	89.309.959	0,444
2014	39.252.442	0	87.558.277	0,448
2015	37.289.083	3.962.441	120.138.893	0,343
2016	29.588.060	2.137.752	121.623.355	0,261
2017	56.843.655	2.150.837	139.074.658	0,424

Sumber: Data Diolah

Dapat dilihat pada Tabel 4.7 bahwa hasil rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013 hingga 2015 hasil rasio cakupan kas terhadap hutang lancar menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup kewajiban lancar karena rasio yang diperoleh kurang dari satu. Hal ini terjadi karena tiap tahunnya hutang lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan arus kas operasi ditambah dengan deviden kas. Untuk itu perusahaan harus mengurangi melakukan pinjaman untuk tiap tahunnya. Hal tersebut telah dilakukan perusahaan.

d. Rasio Kecukupan Arus Kas (KAK)

Rasio ini mengukur kemampuan PT PLN (Persero) dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka 5 tahun

mendatang. Adapun data yang diperlukan untuk menghitung rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

**Data Rasio Kecukupan Arus Kas PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	EBIT	Bunga	Pajak	Pengeluaran Modal
2013	40.935.895	28.366.978	3.221.807	488.102.578
2014	45.811.221	35.381.682	1.704.744	501.706.275
2015	(8.227.086)	37.708.595	3.789.944	1.187.879.590
2016	(31.627.846)	18.285.840	1.927.652	1.145.529.527
2017	(20.178.851)	17.894.129	6.218.927	1.204.568.429

Sumber: Laporan Arus Kas Konsolidasi PT PLN (Persero)

Rasio ini diperoleh dengan (laba sebelum pajak dan bunga dikurangi pembayaran bunga dikurangi pembayaran pajak dikurangi pengeluaran modal) dibagi (rata-rata hutang yang jatuh tempo setiap tahun selama lima tahun). Maka rumus untuk menghitung rasio kecukupan arus kas adalah sebagai berikut:

$$KAK = \frac{EBIT - Bunga - Pajak - Pengeluaran Modal}{Rata - rata Hutang Lancar selama 5 tahun}$$

Sehingga, perhitungan rasio Kecukupan Arus Kas (KAK) pada PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

$$KAK_{2013} = \frac{40.935.895 - 28.366.978 - 3.221.807 - 488.102.578}{111.541.028}$$

$$= - 4, 292$$

Maka, Rasio kecukupan arus kas untuk tahun 2013 adalah sebesar - 4,292 yang berarti perusahaan tidak mampu menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, karena rasionya dibawah satu bahkan minus (-4,292 kali).

$$KAK_{2014} = \frac{45.811.221 - 35.381.682 - 1.704.744 - 501.706.275}{111.541.028}$$

$$= - 4, 419$$

Maka, Rasio kecukupan arus kas untuk tahun 2014 adalah sebesar - 4,419 yang berarti perusahaan tidak mampu menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, karena rasionya dibawah satu bahkan minus (- 4, 419 kali).

$$KAK_{2015} = \frac{-8.227.086 - 37.708.595 - 3.789.944 - 1.187.879.590}{111.541.028}$$

$$= - 11,095$$

Maka, Rasio kecukupan arus kas untuk tahun 2015 adalah sebesar - 11,095 yang berarti perusahaan tidak mampu menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, karena rasionya dibawah satu bahkan minus (- 11,095 kali).

$$KAK_{2016} = \frac{-31.627.846 - 18.285.840 - 1.927.652 - 1.145.529.527}{111.541.028}$$

$$= - 10,735$$

Maka, Rasio kecukupan arus kas untuk tahun 2016 adalah sebesar - 10,735 yang berarti perusahaan tidak mampu menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, karena rasionya dibawah satu bahkan minus (-10,735 kali).

$$KAK_{2017} = \frac{-20.178.851 - 17.894.129 - 6.218.927 - 1.204.568.429}{111.541.028}$$

$$= - 11,196$$

Maka, Rasio kecukupan arus kas untuk tahun 2017 adalah sebesar - 11,196 yang berarti perusahaan tidak mampu menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tabel 4.9

**Data Rasio Kecukupan Arus Kas PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	EBIT	Bunga	Pajak	Pengeluaran Modal	Rasio KAK
2013	40.935.895	28.366.978	3.221.807	488.102.578	- 4, 292
2014	45.811.221	35.381.682	1.704.744	501.706.275	- 4, 419
2015	(8.227.086)	37.708.595	3.789.944	1.187.879.590	- 11,095
2016	(31.627.846)	18.285.840	1.927.652	1.145.529.527	- 10,735
2017	(20.178.851)	17.894.129	6.218.927	1.204.568.429	-11,196

Sumber: Data Diolah

Dapat dilihat pada Tabel 4.9 hasil rasio menunjukkan bahwa dari lima perbandingan tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Rasio kecukupan arus kas tahun 2013 sampai dengan 2017 juga dapat dikatakan kurang baik karena berada dibawah standar rasio menurut Darsono dan Ashari (2005) yaitu kurang dari satu. Hal ini terjadi karena pengeluaran modal perusahaan sangat tinggi.

Menurut Darsono dan Ashari, hasil rasio yang baik ialah yang memiliki hasil lebih dari angka satu. Sehingga Berdasarkan dari perhitungan dan pembahasan mengenai hasil rasio arus kas PT PLN (Persero) pada tahun 2013-2017, maka berikut ini adalah rekapitulasi dari ke empat rasio arus kas tersebut ialah:

Tabel 4.10

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rasio Arus Kas
PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017**

Tahun	AKO	CKB	CKHL	KAK	Total	Ket
2013	0,4274	2,459	0,444	- 4, 292	2,885	Baik
2014	0,4483	2,157	0,448	- 4, 419	2,669	Baik
2015	0,3104	2,089	0,343	- 11,095	-5,559	Tidak Baik
2016	0,2433	3,144	0,261	- 10,735	-4,897	Tidak Baik
2017	0,4087	4,524	0,424	-11,196	-2,161	Tidak Baik

Sumber: Data Diolah

Pada Tabel 4.10 terlihat bahwa kondisi Arus Kas PT PLN (Persero) dikatakan tidak baik. Dalam tiga tahun terakhir rasio arus kas perusahaan berada pada angka dibawah satu atau minus. Karena pada tahun 2015-2017 perusahaan mengeluarkan dana untuk pengeluaran modal yang sangat tinggi, dengan rincian sebagai berikut: tahun 2015 sebesar Rp 1.187.879.590, tahun 2016 sebesar Rp 1.145.529.527 dan Rp 1.204.568.429 untuk tahun 2017.

2. Perhitungan Rasio Likuiditas

Setelah mengetahui bagaimana keadaan arus kas PT PLN (Persero) melalui perhitungan rasio arus kas, maka selanjutnya penulis akan melanjutkan menghitung bagaimana tingkat likuiditas PT PLN (Persero). Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dihitung rasio likuditas terhadap laporan keuangan perusahaan, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau *current ratio*, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 4.11

**Hasil Perhitungan Rasio Lancar PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Hasil Rasio Lancar
2013	84.837.180	89.305.959	98,355%
2014	85.423.738	87.558.277	97,562%
2015	79.344.793	120.138.893	66,044%
2016	98.569.077	121.623.355	81,044%
2017	93.797.251	139.074.658	67,444%

Sumber: Data Diolah

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Sehingga, perhitungan rasio lancar pada PT PLN (Persero) adalah:

$$\begin{aligned}\text{Current Ratio}_{2013} &= \frac{84.837.180}{89.305.959} \times 100\% \\ &= 98,355\%\end{aligned}$$

Artinya setiap Hutang Lancar Rp 100 dijamin dengan Rp 98,355 yang berarti tidak cukup tersedia dana untuk membayar hutang lancar, mengingat standar ratio sebesar 200%.

$$\begin{aligned}\text{Current Ratio}_{2014} &= \frac{85.423.738}{87.558.277} \times 100\% \\ &= 97,562\%\end{aligned}$$

Artinya setiap Hutang Lancar Rp 100 dijamin dengan Rp 97,562 yang berarti tidak cukup tersedia dana untuk membayar hutang lancar, mengingat standar rasio sebesar 200%.

$$\begin{aligned}\text{Current Ratio}_{2015} &= \frac{79.344.793}{120.138.893} \times 100\% \\ &= 66,044\%\end{aligned}$$

Artinya setiap Hutang Lancar Rp 100 dijamin dengan Rp 66,044 yang berarti tidak cukup tersedia dana untuk membayar hutang lancar, mengingat standar rasio sebesar 200%.

$$\begin{aligned}\text{Current Ratio}_{2016} &= \frac{98.569.077}{121.623.355} \times 100\% \\ &= 81,044\%\end{aligned}$$

Artinya setiap Hutang Lancar Rp 100 dijamin dengan Rp 81,044 yang berarti tidak cukup tersedia dana untuk membayar hutang lancar,

mengingat standar rasio sebesar 200%.

$$\begin{aligned} \text{Current Ratio}_{2017} &= \frac{93.797.251}{139.074.658} \times 100\% \\ &= 67,444\% \end{aligned}$$

Artinya setiap Hutang Lancar Rp 100 dijamin dengan Rp 67,444 yang berarti bahwa perusahaan tidak cukup memiliki dana untuk membayar hutang lancar, mengingat standar rasio lancar sebesar 200%.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa *current ratio* dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menggambarkan bahwa PT PLN (Persero) Pusat tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya atau likuid. *Current ratio* 200% kadang-kadang dipertimbangkan sebagai *current ratio* yang memuaskan bagi perusahaan industri dan perusahaan komersial, sedangkan perusahaan penghasil jasa seperti perusahaan listrik dan hotel angka 100% dikatakan sudah cukup.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio / Acid Test Ratio*)

Quick ratio atau acid-test ratio merupakan perbandingan likuiditas yaitu dengan membandingkan harta lancar setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 4.12

**Hasil Perhitungan Rasio Cepat PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Hutang Lancar	Hasil Rasio Cepat
2013	84.837.180	11.343.453	89.305.959	82,29%
2014	85.423.738	11.607.860	87.558.277	84,30%
2015	79.344.793	11.415.863	120.138.893	56,54%
2016	98.569.077	11.569.596	121.623.355	71,53%
2017	93.797.251	12.828.118	139.074.658	58,21%

Sumber: Data Diolah

Sehingga, perhitungan *Quick Ratio* pada PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Quick Ratio}_{2013} &= \frac{84.837.180 - 11.343.453}{89.305.959} \times 100\% \\ &= 82,29\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan aktiva lancar dan persediaan sebesar Rp 82,29 berarti tidak cukup dana untuk membayar kewajiban lancar, mengingat standar *Quick Ratio* sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Quick Ratio}_{2014} &= \frac{85.423.738 - 11.607.860}{87.558.277} \times 100\% \\ &= 84,30\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan aktiva lancar dan persediaan sebesar Rp 84,30 berarti tidak cukup dana untuk membayar kewajiban lancar, mengingat standar *Quick Ratio* sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Quick Ratio}_{2015} &= \frac{79.344.793 - 11.415.863}{120.138.893} \times 100\% \\ &= 56,54\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan aktiva lancar dan persediaan sebesar Rp 56,54 berarti tidak cukup dana untuk membayar kewajiban lancar, mengingat standar *Quick Ratio* sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Quick Ratio}_{2016} &= \frac{98.569.077 - 11.569.596}{121.623.355} \times 100\% \\ &= 71,53\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan aktiva lancar dan persediaan sebesar Rp 71,53 berarti tidak cukup dana untuk membayar kewajiban lancar, mengingat standar *Quick Ratio* sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Quick Ratio}_{2017} &= \frac{93.797.251 - 12.828.118}{139.074.658} \times 100\% \\ &= 58,21\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan aktiva lancar dan persediaan sebesar Rp 58,21 berarti tidak cukup dana untuk membayar kewajiban lancar, mengingat standar *Quick Ratio* sebesar 100%.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan dan terjadi penurunan. Pada tahun 2013, 2014 dan 2016 rasio sangat lancar cenderung mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2015 dan 2017 yang mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi karena terjadi penurunan nilai aset lancar.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas (*Cash Ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Sehingga, perhitungan rasio lancar pada PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13

**Hasil Perhitungan Rasio Kas PT PLN (Persero)
Periode 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Kas	Efek	Hutang Lancar	Hasil Rasio Kas
2013	25.529.969	0	89.305.959	28,59%
2014	27.111.528	0	87.558.277	30,96%
2015	23.596.339	0	120.138.893	19,64%
2016	41.909.223	0	121.623.355	34,46%
2017	42.291.959	0	139.074.658	30,41%

Sumber: Data Diolah

Sehingga, perhitungan *Cash Ratio* pada PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Cash Ratio}_{2013} &= \frac{25.529.969}{89.305.959} \times 100\% \\ &= 28,59\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan kas sebesar Rp 28,59 digunakan untuk membayar hutang jangka pendek yang berarti tidak cukup dana kas untuk membayar hutang jangka pendek, dimana standar *cash ratio* sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Cash Ratio}_{2014} &= \frac{27.111.528}{87.558.277} \times 100\% \\ &= 30,96\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan kas sebesar Rp 30,96 digunakan untuk membayar hutang jangka pendek yang berarti tidak cukup dana kas untuk membayar hutang jangka pendek, dimana standar *cash ratio* sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Cash Ratio}_{2015} &= \frac{23.596.339}{120.138.893} \times 100\% \\ &= 19,64\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan kas sebesar Rp 19,64 digunakan untuk membayar hutang jangka pendek yang berarti tidak cukup dana kas untuk membayar hutang jangka pendek, dimana standar *cash ratio* sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Cash Ratio}_{2016} &= \frac{41.909.223}{121.623.355} \times 100\% \\ &= 34,46\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan kas sebesar Rp 34,46 digunakan untuk membayar hutang jangka pendek yang berarti tidak cukup dana kas untuk membayar hutang jangka pendek, dimana standar *cash ratio* sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Cash Ratio}_{2017} &= \frac{42.291.959}{139.074.658} \times 100\% \\ &= 30,41\% \end{aligned}$$

Artinya, setiap hutang lancar sebesar Rp 100 dijamin dengan kas sebesar Rp 30,41 digunakan untuk membayar hutang jangka pendek yang berarti tidak cukup dana kas untuk membayar hutang jangka pendek, dimana standar *cash ratio* sebesar 100%.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.13, dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan dan terjadi penurunan rasio kas. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan rasio kas sebesar 2,37%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 jumlah kas PT PLN (Persero) mengalami kenaikan dan untuk hutang lancarnya mengalami penurunan menjadi Rp 87.558.277. Lalu pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 11,32%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah kas PT PLN (Persero). Nilai rasio kas PT PLN (Persero) dari periode 2013- 2016 cenderung semakin membaik. Hanya pada tahun 2017 nilai rasio kas mengalami penurunan. Nilai rasio kas pada tahun 2017 walaupun dalam kondisi menurun namun tetap dalam kondisi yang baik yakni 30,41%. Dengan kondisi tersebut artinya dengan jumlah kas yang dimiliki PT PLN (Persero) periode 2017 dapat melunasi jumlah hutang lancar sebesar 30,41%. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017 PT PLN (Persero) kembali menambah jumlah hutang lancarnya menjadi 139.074.658Rp dan memiliki jumlah kas pada tahun tersebut sebesar Rp 42.291.959.